

**PERMASALAHAN PENANGGULANGAN SAMPAH
DAN PENINGKATAN KEBERSIHAN
LINGKUNGAN DI KOTA
LUBUK PAKAM**

SKRIPSI

OLEH

NORA LELI RITA LUMBAN GAOL

**NPM : 08 851 0025
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2012

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERMASALAHAN PENANGGULANGAN
SAMPAH DAN PENINGKATAN KEBERSIHAN
LINGKUNGAN DI KOTA LUBUK PAKAM

Nama Mahasiswa : Nora Leli Rita Lumban Gaol

No.Stambuk : 08.851.0025


Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Drs.H. M.H.Thamrin Nasution,MSI


Drs.M.Aswin Hasibuan,MAP

DEKAN,


Drs.H.Irwan Nasution,S.Pd, MAP

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang pertama ini penulis mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmad-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah “Permasalahan Penanggulangan Sampah dan Peningkatan Kebersihan Lingkungan di Kota Lubuk Pakam”.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd., MAP, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
- Bapak Drs. M. Aswin Hasibuan, MAP, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area dan

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Pembatasan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Hipotesis	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Partisipasi	10
B. Fungsi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	13
C. Pengertian Sampah	15
D. Pengertian Lingkungan Hidup	20
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Populasi dan Sampel	25
B. Metode Pengumpulan Data	26
C. Variabel dan Definisi Operasional	26
D. Teknik Analisis Data	27

BAB IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	28
A. Sejarah Singkat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Deli Serdang	28
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Deli Serdang	29
C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	30
BAB V. ANALISIS DAN EVALUASI.....	41
A. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Kebersihan.....	41
B. Pelaksanaan Penataan Lingkungan di Kabupaten Deli Serdang	46
C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kebersihan dan Penataan Lingkungan Hidup	50
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakekat pembangunan Nasional manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konteks pembangunan bagi seluruh masyarakat Indonesia mengandung makna, bahwa pembangunan ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang ada di pedesaan yang merupakan kelompok terbesar rakyat Indonesia. Bahkan ditinjau dari segi tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan dimaksud, yakni kesejahteraan masyarakat yang merupakan sasaran pokok dan strategi dalam pelaksanaan pembangunan nasional di tanah air.

Berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat. Dengan demikian partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada pembang-unan ditingkat pusat saja tetapi juga dimaksudkan bagi segenap kegiatan pembangunan termasuk di Daerah.

Oleh karena itu sudah saatnyalah masyarakat yang bermukim di daerah yang masih mempunyai keterkaitan terhadap berbagai aspek kehidupan yang merupakan faktor penghambat terhadap partisipasinya, mendapat perhatian yang lebih serius dari pihak pemerintah selaku pemegang sentral dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Agustoha R. Kustawa mengemukakan bahwa :

Sasaran utama yang ingin dicapai dalam pembangunan nasional umumnya dan pembangunan desa khususnya adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri, membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila secara bertahap melalui pelaksanaan pelita-pelita yang berkesinambungan dalam satu kurun waktu tertentu dengan batasan sasaran yang meningkat.¹

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah kota di Propinsi Sumatera Utara termasuk daerah yang menjadi sasaran pembangunan Nasional. Sebagai sebuah kota maka perihal masalah kebersihan adalah masalah utama dalam gerak langkah perkembangan sebuah kota.

Dengan demikian jelasnya bahwa masyarakat perkotaan adalah merupakan kelompok atau unit yang mempunyai pengaruh besar dalam rangka pelaksanaan pembangunan bangsa, yaitu pembangunan kelurahan tersebut merupakan basis atau ujung tombak pembangunan nasional.

Seiring dengan meningkatnya pembangunan, maka meningkat pula risiko terhadap pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang bagi kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup akan menjadi beban sosial yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Semua orang sepakat bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perbuatan manusia di samping perbuatan alam itu sendiri. Dalam hal perbuatan manusia sudah

¹ Agustoha R. Kustoha, *Managemen Pembangunan Desa*, Penerbit Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 21.

termasuk perbuatan oleh sebuah perusahaan baik swasta maupun pemerintah, yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan berbagai jenis bahan kimia, zat radioaktif dan tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas mesin atau pabriknya cukup tinggi sehingga disadari atau tidak, ini akan membawa pengaruh yang cukup besar terhadap lingkungan sekitarnya seperti pencemaran lingkungan melalui polusi udara, polusi air, serta kebisingan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan.

Tidak semua masalah lingkungan di atas diangkat menjadi bahan penelitian dalam skripsi ini yang salah satunya adalah masalah kebersihan. Kebersihan memiliki aspek yang sangat fundamental dalam membentuk kesehatan masyarakat, karena dengan lingkungan yang bersih maka akan didapatkan masyarakat yang sehat.

Keberadaan Undang-Undang No. 37 Tahun 2009 yang mengatur tentang lingkungan hidup mempunyai kaitan yang sangat erat dengan fungsi dan peranan pemerintah sebagai suatu lembaga yang memiliki wewenang melalui instansinya untuk mengontrol dan mengawasi lingkungan hidup termasuk mengurus masalah kebersihan khususnya permasalahan sampah.

Penataan kebersihan sebagai suatu ilmu pemerintahan meletakkan fungsi-fungsi pemerintah untuk mengatur dan mengelola lingkungan hidup khususnya kebersihan, sehingga kedudukan yang demikian memberikan akibat bagi pemerintahan bahwa kepentingan rakyat banyak akan lingkungan hidup yang bersih, teratur merupakan suatu cerminan fungsi-fungsi pelaksanaan pemerintahan yang baik

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih judul : **PERMASALAHAN PENANGGULANGAN SAMPAH DAN PENINGKATAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN DELI SERDANG**



B. Perumusan Masalah

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kekaburan, maka penelitian ilmiah harus dilengkapi dengan perumusan masalah. Perumusan masalah itu bertujuan agar masalah tersebut menjadi jelas hakekatnya, kedudukan serta sekaligus mencari alternatif untuk pemecahannya.²

Masalah menurut Mohammad Hatta adalah: “Kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya, kita tidak puas dengan melihatnya saja, melainkan kita ingin mengetahui lebih dalam”.³

Sedangkan menurut Winarno Surakhmad, mengatakan :

“Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui dengan jalan semestinya apabila kita akan berjalan terus. Masalah menampakkan diri sebagai tantangan”.⁴

Perumusan masalah adalah salah satu syarat untuk memakai prosedur ilmiah yang ditetapkan, sehingga akan mempermudah pengumpulan data yang relevan yang

² Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, remadja Karya, Bandung, 2005, hal. 8.

³ Mohammad Hatta, *Pengantar Ke Jalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara, Jakarta, 2009, hal. 12.

⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 2005, hal. 34.

menjadi pokok pembahasan dari pelaksanaan program pembangunan kelurahan, maka dengan ini penulis merumuskan masalah yaitu “Bagaimana penanggulangan permasalahan sampah dalam upaya peningkatan kebersihan di lingkungan Kabupaten Deli Serdang diterapkan”.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah sangat penting dalam upaya mempermudah pengumpulan data pembahasannya bagi penulis. Adapun pengertian masalah adalah : kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya kita tidak puas dengan melihat saja, melainkan kita ingin mengetahuinya lebih dalam.⁶

Adapun yang menjadi batasan permasalahan untuk penelitian ini adalah :

1. Permasalahan penanggulangan sampah dan peningkatan kebersihan.
2. Lokasi penelitian pada Kabupaten Deli Serdang khususnya pada Dinas Kebersihan Kabupaten Deli Serdang.
3. Tahun penelitian dikumpulkan dari tahun 2011.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlunya penanggulangan sampah dan peningkatan kebersihan lingkungan..

- b. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi serta menghambat pelaksanaan program pembangunan di bidang kebersihan tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah

- a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis.
- b. Untuk menguji kemampuan berfikir penulis dalam menuangkan penulisan skripsi.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan study di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

E. Kerangka Pemikiran

Ada beberapa ahli memberikan batasan tentang pengertian partisipasi, yaitu Winardi berpendapat : “Turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut ”.⁵

Selanjutnya Talizidihu Ndraha menyatakan :

1. Titik berat partisipasi adalah pada keterlibatan emosional. Kehadiran secara fisik semata-mata di dalam suatu kelompok tanpa keterlibatan tersebut bukanlah partisipasi.
2. Kesiediaan untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan ada bermacam-macam misalnya barang, uang, jasa, buah pikiran, keterampilan dan sebagainya.

⁵ Winardi, *Asas-Asas Manajemen*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 79.

3. Kesiediaan untuk bertanggung jawab.⁶

Berdasarkan defenisi tersebut diatas, jelaslah titik berat partisipasi dibidang pembangunan adalah masyarakat telah terlibat, baik mental, emosional maupun pribadi serta kesiediaan masyarakat tersebut memberikan kontribusi atau sumbangan. Bentuk sumbangan tersebut antara lain : jasa, buah pikiran, keterampilan dan kesiediaan masyarakat untuk bertanggung jawab.

Sedangkan pengertian masyarakat, penulis mengutip pendapat seorang ahli dibidang sosiologi, yaitu Hasan Shadily mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain”.⁷

Dapat diketahui bahwa masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang terdiri dari berbagai golongan yang saling mempengaruhi.

Sedangkan menurut Max Iver dan Page yang dikutip Soerjono Soekanto memberikan definisi masyarakat sebagai berikut :

Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. Dan masyarakat selalu berubah.⁸

⁶ S.P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 2009, hal. 2 dan 3.

⁷ Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, PT. Pembangunan, Jakarta, 2008, hal.

31.

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta, 2002, hal. 22.

Walaupun definisi yang diberikan para sarjana sosial tersebut berlainan akan tetapi pada dasarnya isinya adalah sama, yaitu masyarakat mencakup beberapa unsur antara lain :

1. Manusia hidup bersama, berarti orangnya minimum dua atau lebih
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan manusia tidak sama dengan kumpulan benda mati. Oleh karena manusia adalah bertambah, yang menghasilkan manusia-manusia baru yang dapat berbicara. Mereka juga berkeinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaan kepada teman-temannya. Sebagai akibat itu timbullah sistem komunikasi dan timbul peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompoknya.
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama untuk menimbulkan kebudayaan. Oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu sama lain.

Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk meningkatkan dan memperbaiki untuk kesejahteraan seluruh rakyat baik yang berada di kota maupun di kelurahan.

S.P. Siagian mengemukakan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa.⁹

⁹ Taliziduhu, *Metodologi Pembangunan Desa*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2002, hal. 25.

Dari batasan-batasan tersebut di atas, berarti di bidang pembangunan masyarakat harus dilibatkan dengan kata lain bahwa partisipasi masyarakat sangat menentukan dalam rangka keberhasilan pembangunan.

Kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah sebagai inisiatif yang lahir dari rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sangat diperlukan sesuai dengan hakekat pembangunan kelurahan pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat sendiri, dari dan untuk masyarakat dengan pengarahan, bimbingan, bantuan, pembinaan dari pemerintah.

F. Hipotesis

Hadari Nawawi menyatakan : Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian yang harus diuji kebenarannya dengan jalan riset, oleh karena itu hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar mungkin salah.¹⁰

Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah. “Apabila masyarakat dapat diberikan penyuluhan tentang pentingnya kebersihan dan partisipasi mereka dapat ditingkatkan maka permasalahan sampah sebagai salah satu dimensi persoalan kebersihan perkotaan akan berhasil secara efektif dan efisien”.

¹⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, UGM, Yogyakarta, 2003, hal. 141.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Partisipasi

Istilah partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “Participation”, yang berarti mengambil bagian.

R.A. Santoso Sastro Poetro menyebutkan : “Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan”.¹¹

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan seseorang, baik secara mental maupun fisik dalam suatu kegiatan kelompok tertentu yang mendorongnya untuk mendukung ataupun melaksanakan tercapainya tujuan-tujuan kelompok dan ikut sertanya mereka untuk bertanggung jawab.

Menurut Suwignjo, dalam bukunya Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa, mengatakan bahwa: “partisipasi adalah sumbangan warga desa dalam setiap kegiatan pembangunan”.¹²

Sedangkan menurut K. Davis, sebagaimana yang dikutip oleh Taliziduhu Ndraha, mengatakan bahwa :

¹¹ R.A. Santoso Poetro, *Partisipasi Komunikasi Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 1996, hal. 13.

¹² Suwignyo, *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hal. 209.

“Partisipasi didefinisikan sebagai suatu sikap mental dan emosional ke dalam situasi kelompok dengan kesediaan memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan kelompok dan kesediannya turut bertanggung-jawab”.¹³

Dari kedua pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan individu selaku warga masyarakat, ke dalam kelompok kerjasama dengan memberikan sumbangan dalam bentuk pendapat, tanggapan, waktu, tenaga dan materiil lainnya. Dalam hubungan ini, Sumber Saparin mengingatkan hal-hal sebagai berikut :

1. Janganlah warga masyarakat kelurahan dibiarkan terus-menerus di dalam ikatan tradisi yang menghambat kemajuan, perlulah diusahakan social reform yang serasi (pembangunan bidang mental spritual) sebagai landasan pembangunan masyarakat yang maju.
2. Mengembangkan partisipasi warga masyarakat kelurahan dalam arti formal dan informal sehingga merupakan kekuatan autoaktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam memecahkan persoalan bersama warga kelurahan yang bersangkutan, ialah pengorganisasian dan institusional kepentingan rakyat dalam organisasi kemasyarakatan, ekonomi, sosial dan lain-lain.
3. Pembentukan dana masyarakat secara gotong royong mengingat bahwa pembangunan tidak harus dibiayai oleh Pemerintah, tetapi harus pula berlandaskan pada kesediaan warga masyarakat untuk menyediakan dana-dana yang diperlukan.
4. Menghilangkan adat istiadat/kebiasaan yang melemahkan perekonomian rakyat (upacara-upacara adat tradisonal yang kurang relevan dengan pembangunan).¹⁴

Mengingat semakin pesatnya pembangunan yang bertumpuk di wilayah kelurahan dan untuk lebih menjangkau kebutuhan dasar masyarakat dimana rencana

¹³ Taliziduhu Ndraha, *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2003, hal. 124.

¹⁴ Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 43-44.

pembangunan diproses dan disusun dari bawah (bottom-up planing), maka partisipasi masyarakat kelurahan harus benar-benar ditingkatkan.

Dengan adanya sistem perencanaan dari bawah tersebut lebih menekankan untuk menghimpun, menyerap, menyalurkan dan menyaring aspirasi yang berkembang dalam masyarakat berupa kebutuhan pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat.

Dalam hubungannya dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa/kelurahan, menurut Suwignjo, dapat diwujudkan dalam bentuk :

1. Tenaga kerja di desa / kelurahan (manusia dan hewan)
2. Substitusi tenaga kerja, yaitu penggantian tenaga kerja manusia dengan uang
3. Bahan-bahan bangunan dan bahan makanan yang disumbangkan dapat dinilai dengan uang
4. Barang atau hasil bumi, yang sesuai dengan musyawarah dapat dilelang untuk dijadikan uang
5. Dan lain-lain.¹⁵

Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pada akhirnya diharapkan tumbuhnya rasa memiliki, sehingga pemeliharaan hasil-hasil pembangunan dapat dijamin.

Sesuai dengan pendapat para ahli bahwa partisipasi dapat dibagi atas beberapa jenis, tergantung kepada subjek dan objek yang dilaksanakan.

Menurut S.P. Siagian partisipasi dapat dibagi atas partisipasi pasif dan partisipasi aktif.¹⁶

¹⁵ Suwignjo, *Op.Cit*, hal. 209.

¹⁶ S.P. Siagian, *Proses Pengelola dan Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta, 1994, hal. 33.

Partisipasi pasif dapat dibagi atas :

1. Sikap dan
2. Prilaku

Sedangkan partisipasi aktif dapat dibagi dalam bentuk :

1. Turut memikirkan nasib sendiri dengan pemanfaatan lembaga sosial politik.
2. Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi.
3. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab.
4. Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama.

Selanjutnya Miftah Thoha jenis partisipasi dapat dibagi atas :

1. Partisipasi Buah Pikiran,
2. Partisipasi Keterampilan
3. Partisipasi Tenaga
4. Partisipasi Harta Benda
5. Partisipasi Uang.¹⁷



B. Fungsi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dewasa ini memang merupakan suatu problem yang perlu mendapat perhatian tersendiri.

J. Wayong mengatakan : Fungsi adalah sekelompok kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha yang satu dengan lainnya mempunyai hubungan yang erat untuk

¹⁷ Miftah Thoha, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, CV. Rajawali, Jakarta, 1994, hal. 73.

menyelenggarakan segi-segi tugas pokok.¹⁸

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan. Ikut sertanya masyarakat bila melalui beberapa tingkatan-tingkatan yang paling tinggi di mana masyarakat secara aktif ambil bagian dalam suatu pembangunan.¹⁹

Sedangkan partisipasi adalah penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja ke dalam situasi kelompok yang mendorong agar mereka menyumbang kemampuannya ke arah tujuan kelompok yang bersangkutan.²⁰

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi mencakup :

1. Penyertaan pikiran dan perasaan,
2. Usaha-usaha untuk memberikan dorongan kepada bawahan untuk mengembangkan kemampuannya, sehingga daya kemampuan berpikir secara kreatif dan prakarsa dapat diambil serta diputuskan untuk diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu.
3. Mendorong bawahan untuk ikut serta bertanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan kelompok.

Tegasnya partisipasi tidak hanya merupakan kegiatan fisik dari masyarakat semata-mata dan dilakukan bukan karena paksaan, melainkan dengan rasa kesadaran agar memberikan suatu tanggung jawab bagi mereka.

¹⁸ J. Wayong, *Fungsi Administrasi Negara*, Djambatan, 2003, hal. 120.

¹⁹ Ghajali, *Menggalakkan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan*, Socilia, Jakarta, 2009, hal. 55.

²⁰ Pariata Westra, *Hubungan Kerja Kemanusiaan*, Balai Pembinaan Administrasi UGM, Yogyakarta, 1997, hal. 14.

C. Pengertian Sampah

Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Limbah sendiri atau bahan buangan dapat terdiri dari tiga bentuk keadaan, yakni limbah padat, limbah cair, dan limbah gas.²¹ Dari ketiga bentuk limbah ini, limbah padat atau sampah lebih sering dijumpai, terdapat dimana-mana dan kini semakin menjadi topik pembicaraan hangat untuk ditanggulangi.

Membicarakan masalah kebersihan lingkungan perkotaan dan pemukiman sudah barang tentu tidak akan lepas dari membicarakan masalah sampah. Sampah pada saat ini, sudah merupakan suatu benda yang ditakuti, dibenci dan bahkan menurut beberapa slogan “perlu diperangi”.

Bila diamati dari berbagai rujukan dan pengalaman di berbagai negara, permasalahan sampah sebenarnya berjalan seiring dengan kebudayaan masyarakatnya itu sendiri, serta semakin maju kebudayaan suatu bangsa diduga sampah yang dihasilkannya pun semakin banyak. Ini tidak mengherankan karena semakin berkembang suatu industri, semakin banyak bahan baku yang digunakan, semakin tinggi produk yang diperoleh, dan otomatis semakin tinggi pula sampahnya yang ikut dihasilkannya.

Makin berkembangnya industri dan kebudayaan, bukan hanya meningkatkan jumlah sampah secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif. Artinya sampah yang dihasilkan tidak hanya berupa bahan organik sisa hasil pertanian, tetapi juga semakin

²¹ E. Gumpita Sa'id, *Sampah Masalah Kita Bersama*, Mediyatama Sarana Perkasa, Jakarta, 1997, hlm. 1.

beragam menjadi sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan bahan-bahan lain yang tidak mudah didaur-ulangkan. Bahan-bahan sisa atau sampah anorganik ini merupakan ciri dari kebudayaan yang semakin modern. Bila diamati secara seksama perkembangan sampah di Indonesia dari tiga dasawarsa terakhir, kita bersama akan merasakan bahwa kian hari, jenis sampah yang terpaksa kita hasilkan semakin kompleks.

Masalah penanganan sampah ternyata tidak mudah, melibatkan banyak pihak, memerlukan teknologi, memerlukan dana yang cukup besar dan memerlukan keinginan yang kuat untuk melaksanakannya. Sebenarnya sampah perlu dihargai lebih tinggi, dalam artian diperlakukan dengan benar, bukannya hanya dicampakkan sembarangan begitu saja.

Bila direnungkan bersama, bahan yang kini menjadi sampah, sebelumnya ternyata merupakan pelindung barang yang kita perlukan, misalnya kulit pisang, sebelum menjadi sampah akibat buah pisangnya dimakan, sudah barang tentu merupakan pembungkus buah pisang, sehingga tanpa kulit maka buah tersebut tidak akan menjadi matang, atau busuk karena dirombak oleh mikroorganisme. Kertas karton atau dus, yang merupakan sampah, barangkali sebelumnya adalah pembungkus atau kemasan TV, radio atau lemari es yang mahal harganya. Tanpa kemasan karton tersebut maka barang-barang yang mahal di atas tidak akan dapat keluar dari pabriknya dengan aman, karena akan menjadi rusak, cacat atau bahkan hancur berantakan.

Dengan demikian sebenarnya kita perlu merasa perlu memperlakukan pelindung barang-barang yang kita butuhkan dengan mencampakkannya begitu saja. Bangsa yang berbudaya tinggi tentu saja tidak mengikuti peribahasa “habis manis sepah dibuang”, tetapi memperlakukan sampahnya dengan baik. Secara filosofis, sampah harus dapat kita anggap sebagai suatu benda yang berharga, bukan suatu benda yang patut dibenci. Sampah adalah bahan baku, misalnya untuk pembuatan pupuk, gas bio dan lain-lain.

Oleh karena itu sampah yang ikut kita hasilkan dalam kehidupan sehari-hari harus lebih dihargai dengan tidak membuangnya di sembarangan tempat, tetapi dikumpulkannya terlebih dahulu dalam tempat yang baik, untuk seterusnya ditangani secara bersama-sama. Dengan cara ini ada dua keuntungan yang mungkin dapat diperoleh, yakni :

- (1) Sampah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan
- (2) Sampah tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan barang-barang yang jauh lebih bermanfaat.

Penanganan dan penanggulangan sampah di Indonesia kini semakin digalakkan, karena dampak negatif sampah sudah semakin terasa. Dari pihak pemerintah sendiri sudah ada penghargaan yang nyata dengan memberikan anugerah ADIPURA, sebagai hadiah bagi kota yang terbersih lingkungannya, terutama dari sampah. Sistem hadiah ini mempunyai kecenderungan positif, karena kota-kota di Indonesia kini semakin berlomba-lomba membersihkan lingkungannya. Tercatat Bogor dan Padang sebagai peraih Adipura tahun 1986, dan kota-kota Bandung, Solo,

Bogor dan Jambi untuk tahun 1987.

Pembagian sampah dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari kondisi yang dianut oleh kebijakan negara setempat. Ada yang berdasarkan sumber penghasilannya, ada yang berdasarkan komposisinya, dan ada pula yang berdasarkan cara penanganannya. Namun demikian ada dua cara pembagian yang sering digunakan, yakni berdasarkan istilah teknis dan berdasarkan kepada sumbernya.

Pembagian sampah berdasarkan istilah teknis menghasilkan enam jenis sampah, yakni :²²

1. Sampah yang bersifat semi basah. Golongan ini merupakan bahan-bahan organik, misalnya sampah dapur dan sampah restoran, yang kebanyakan merupakan sisa buangan sayuran dan buah-buahan. Sampah jenis ini bersifat mudah terurai, karena mempunyai rantai ikatan kimiawi yang pendek.
2. Sampah organik yang sukar terurai karena mempunyai rantai ikatan kimia yang panjang, misalnya plastik, kaca dan selulosa.
3. Sampah berupa abu yang dihasilkan pada proses pembakaran. Secara kuantitatif sampah jenis ini sedikit, tetapi pengaruhnya bagi kesehatan cukup besar.
4. Sampah, berupa jasad hewan mati, misalnya bangkai tikus, anjing, ayam, ikan dan burung.
5. Sampah jalanan, yakni semua sampah yang dapat dikumpulkan secara penyapuan di jalan-jalan, misalnya daun-daunan, kantung plastik, kertas dan lain-lain.

²² E. Gumpita Sa'id, *Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan*, Mediyatama Sarana Perkasa, Jakarta, 1997, hlm. 23.

6. Sampah industri, yakni sampah yang berasal dari kegiatan produksi di industri. Secara kuantitatif jenis limbah ini banyak, tetapi ragamnya tergantung dari jenis industri tersebut.

Setelah membicarakan pembagian sampah secara teknis, kita perlu mengetahui pembagian sampah secara sumbernya. Pengetahuan ini amat penting sebagai upaya untuk melakukan penanganan sampah secara awal dengan lebih terprogram. Berdasarkan sumbernya minimal ada empat jenis sampah, yakni :²³

1. Sampah Domestik

Sesuai dengan asal katanya, maka sampah ini berasal dari lingkungan perumahan atau pemukiman, baik didaerah perkotaan maupun pedesaan. Ragam sampah di daerah perkotaan biasanya lebih banyak serta jenis sampah anorganiknya secara kuantitatif dan kualitatif lebih kompleks. Sampah di pedesaan umumnya lebih berupa bahan-bahan organik sisa produk pertanian, sedangkan sampah anorganiknya lebih sedikit.

2. Sampah Komersial

Yang dimaksud sampah komersial tidaklah berarti sampah tersebut mempunyai nilai ekonomi untuk dapat langsung diperdagangkan, tetapi lebih merujuk kepada jenis kegiatan yang menghasilkannya. Sampah komersial dihasilkan dari lingkungan kegiatan perdagangan, seperti toko, warung, restoran dan pasar atau toko swalayan. Keragaman jenis sampahnya sangat tinggi, dan dapat berupa bahan

²³ Ibid, hlm. 25.

organik ataupun anorganik.

3. Sampah industri

Seperti yang telah disebutkan di atas, sampah ini merupakan hasil samping kegiatan industri, yang jenisnya sangat tergantung pada kegiatan industri itu sendiri.

4. Sampah Alami dan Lainnya

Sampah jenis ini dapat berupa dedaunan, sisa bencana alam dan lain-lain. Selain itu dapat juga merupakan sampah-sampah yang dihasilkan oleh taman, tempat-tempat rekreasi, kendaraan umum, terminal, pelabuhan udara dan lain-lain.

D. Pengertian Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan merupakan terjemahan dari istilah “*Enverenment*“ dalam Bahasa Inggris atau “*l’environnement*“ dalam Bahasa Perancis, “*Unwelt*“ dalam Bahasa Jerman “*Millieu*“ dalam Bahasa Belanda, “Alam sekitar“ dalam Bahasa Malaysia“. ²⁴

Undang-Undang No. 37 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup selalu mempergunakan istilah lingkungan hidup di dalam berbagai ketentuan .

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2009 mengatakan lingkungan hidup adalah “ kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan

²⁴ Abdurrachman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008.hal. 6.

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain “.

Dari hasil seminar segi-segi hukum pengelolaan lingkungan hidup, terdapat pendapat : “Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi termasuk manusia dan tingkah lakunya yang ada dalam ruang kita tempati yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya“.²⁵

Menurut Emil Salim, lingkungan hidup adalah :

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti, faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.²⁶

Yang mengganggu keserasian, keselarasan dan keseimbangan perlu ditanggulangi karena semua itu tiada akhirnya akan menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan.

Mengingat banyak permasalahan yang terdapat dalam lingkungan hidup ini, maka untuk memahami aneka permasalahan yang ada perlu adanya pendekatan yang membatasi diri pada satu kajian khusus tentang lingkungan. Sekarang ini yang diperlukan adalah “Pendekatan yang bersifat lintas sektor multidisipliner, transdisipliner pendekatan yang sejenis itu“.²⁷

²⁵ BPHN, *Seminar Segi-Segi Hukum Dari pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bina Cipta, Bandung, 1997, hal. 2.

²⁶ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 2002, hal. 15.

²⁷ Abdurrahman, *Pengembangan Azas dan Sistem Hukum Lingkungan*, Makalah pada Konpersi Pusat Study Lingkungan Seluruh Indonesia, Jakarta, 1991, hal. 1.

Selanjutnya Munadjat Danusaputro, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman berpendapat, Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya²⁸.

Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Secara teori ruang itu tidak terbatas jumlahnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam, seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas yang tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.²⁹

Selanjutnya beberapa ahli mengadakan pengelompokkan lingkungan atas beberapa macam, secara umum dapat digolongkan atas 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Lingkungan fisik (Physical Environment).

Lingkungan fisik adalah segala sesuatu di sekitar kita, yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan lain-lain yang semacamnya.

2. Lingkungan Biologis (Biological Environment).

Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa golongan organisme hidup lainnya selain dari manusia itu sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik (plankton) dan lain-lainnya.

²⁸ Ibid, hal. 67.

²⁹ Otto Soemarwoto, *Permasalahan Lingkungan Hidup*, Makalah pada Seminar Segi-Segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, BPHN, Bina Cipta Bandung, 1997, hal. 30.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

3. Lingkungan Sosial (Social Environment).

Lingkungan sosial adalah segala sesuatu yang berada di sekitarnya seperti tetangga, teman dan lain-lain.

Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada dalam batas wilayah negara Republik Indonesia, menurut penjelasan umum Undang-Undang 37 Tahun 2009, lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidaklah mengenal batas wilayah negara ataupun wilayah administratif. Akan tetapi jika lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya, maka harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut, karena itu jelas bahwa konsep ekologi semata, akan tetapi juga merupakan konsep hukum dan politis.

Lingkungan hidup Indonesia menurut konsep kewilayahan merupakan suatu pengertian hukum. Dalam pengertian ini, lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah kawasan Nusantara yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa dan rakyat Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspek kehidupannya.

Untuk hidup dan untuk meningkatkan kehidupan manusia membutuhkan air, udara, energi, mineral, kayu dan serat untuk kebutuhan hidup, ketersediaan bahan-bahan itu tergantung pada mutu lingkungan, berarti lingkungan itu merupakan sumber daya yang memenuhi kebutuhan kita sebagai bahan produksi.

Jadi sumber daya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Suatu ekosistem yaitu lingkungan tetap berlangsungnya hubungan timbal

balik antara makhluk hidup satu sama lainnya. Oleh karena itu pendayagunaan sumber daya pada hakekatnya adalah melakukan perubahan-perubahan di dalam satu ekosistem yang pengaruhnya akan menjalar pada seluruh jaringan kehidupan.

Dengan demikian lingkungan hidup itu selalu berkaitan dan berhubungan dengan keseluruhan sumber daya baik sumber daya manusia maupun daya alam.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sample

Populasi merupakan keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan di duga sedangkan sample bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian ini.

Sugiono di dalam bukunya metode penelitian Administrasi. Menyatakan bahwa populasi adalah obyek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁰

Sedangkan sample Suharsini Arikunto menyatakan : Sample adalah sebagai atau mewakili populasi yang diteliti”.³¹

Adapun yang menjadi populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : seluruh pegawai di Dinas Kebersihan Kabupaten Deli Serdang.

Teknik penarikan sample dalam penelitian ini adalah secara acak sederhana, artinya sampel diambil sedemikian rupa sehingga setiap unit penelitian dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 51.

³¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hal. 102.

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data maupun keterangan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan.

1. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mempelajari atau mengumpulkan keterangan atau bahan dari buku yang berhubungan dengan masalah yang di tulis pada penelitian.
2. Penelitian lapangan (field research) yaitu turun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini, dengan cara melakukan observasi ke lapangan, wawancara dengan lurah dan dengan beberapa penduduk yang dianggap perlu yang mengetahui objek yang diteliti.

C. Variabel dan Defenisi Operasional

Adanya variabel dalam suatu penelitian akan menentukan adanya hubungan secara sistematis. Dalam penelitian ini akan dikemukakan dua variabel yaitu :

1. Variabel Bebas (independent variabel)

Yaitu variabel yang disangka atau dianggap sebagai sebab dari suatu gejala atau variabel yang diselidiki pengaruhnya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah : Penanggulangan sampaj dengan indikatornya :

- a. Ikut serta membayar retribusi kebersihan
- b. Ikut serta dalam program kebersihan yang dijalankan.

2. Variabel Terikat (dependent variabel)

Yaitu yang di duga akan timbul sebagai pengaruh variabel bebas atau yang di

sangka. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah, kebersihan lingkungan, dengan indikatornya :

- a. Kebersihan rumah tangga
- b. Kebersihan lingkungan.

Adapun operasional variabel dalam penelitian ini adalah :

- a. Ikut serta membayar retribusi kebersihan adalah suatu bentuk kewajiban dari masyarakat dalam hal pelaksanaan kebersihan.
- b. Ikut serta dalam program kebersihan yang dijalankan adalah program-program yang disusun oleh pihak pemerintah dan masyarakat terlibat di dalamnya.
- c. Kebersihan rumah tangga adalah kebersihan yang dijalankan dan diterapkan dalam suatu rumah tangga.
- d. Kebersihan lingkungan merupakan tindakan bersama dari sekumpulan masyarakat untuk menjalankan kebersihan di sekitarnya.

D. Metode Analisis Data

Dalam penelitian skripsi ini metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif yang terjadi kepada keadaan yang sekarang ini, dengan jelas mengumpulkan data, menyusun dan menganalisisnya.

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

BAB IV

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Deli Serdang

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Deli Serdang merupakan pengembangan dari sebagian tugas-tugas Pekerjaan Umum di mana urusan Kebersihan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1987 dibentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan perkembangan kota. Dinas itu melaksanakan urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Kebersihan dan Pertamanan dengan tugas antara lain :

1. Melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Kebersihan dan Pertamanan.
2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lubuk Pakam.

Selanjutnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan statusnya menjadi Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2001 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah Kota.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, baik atas dasar kewenangan pangkal maupun berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 17 Tahun 2002 maka Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Deli Serdang berubah kembali menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Deli Serdang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Deli Serdang

Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga dibidang Kebersihan dan Pertamanan;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis, di bidang pekerjaan umum yang meliputi pekerjaan pengelolaan kebersihan dan pertamanan kota;
- b. Melaksanakan kebijaksanaan teknis tentang pembangunan dan pengelolaan kebersihan dan persampahan, pemanfaatan sampah, pemberian bimbingan dan pengolahan kebersihan lingkungan dan persampahan;

- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kebersihan lingkungan dan persampahan, kebersihan sungai dan pengelolaan lumpur tinja;
- d. Melaksanakan pengaturan pengelolaan kebersihan kota dan pemeliharaan taman kota;
- e. Menyelenggarakan pengadaan dan perawatan terhadap taman kota, pemakaman umum serta angkutan dan peralatan persampahan;
- f. Melaksanakan perencanaan pembangunan dan pengelolaan lampu hias dan lampu penerangan jalan umum (LPJU);
- g. Merumuskan dan melaksanakan perencanaan, penyusunan program serta pembinaan masyarakat tentang pengelolaan dan pengendalian kebersihan lingkungan;
- h. Mengelola administrasi umum meliputi ketatausahaan dinas, kepegawaian, keuangan, peralata/perlengkapan.

C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur organisasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Deli Serdang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 17 Tahun 2002, yang pada dasarnya terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha
3. Sub Dinas Penyusunan Program dan Pembinaan Masyarakat
4. Sub Dinas Kebersihan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

5. Sub Dinas Pertamanan, LPJU dan Pemakaman Umum
6. Sub Dinas Angkutan dan Peralatan

Bagian Tata Usaha

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan di bidang ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perencanaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan urusan umum lainnya;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Dinas;
- b. Mengelola urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan serta rencana penyusunan laporan keuangan;
- c. Mengelola urusan administrasi kepegawaian;
- d. Mengelola urusan administrasi, perlengkapan, kerumahtanggaan dan pengadaan barang;
- e. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum lainnya;
- f. Memberikan laporan kegiatan yang dilaksanakan kepada Kepala Dinas;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;

(2) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat menyurat, kepegawaian serta melaksanakan koordinasi dalam rangka kesejahteraan pegawai dan urusan umum lainnya;

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan perbendaharaan serta penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan perlengkapan kerumahtanggaan dan pengadaan barang.

Sub Dinas Penyusunan Program dan Pembinaan Masyarakat

(1) Sub Dinas Penyusunan Program dan Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Kebersihan dan Pertamanan di bidang perumusan perencanaan, penyusunan program dan pembinaan masyarakat tentang pengelolaan kebersihan, pertamanan dan lampu penerangan jalan;

(2) Sub Dinas Penyusunan Proram dan Pembinaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud di atas, Sub Dinas Penyusunan Program dan Pembinaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun kegiatan kerja dan rencana kerja;
- b. Menyusun rencana peningkatan pelayanan kebersihan termasuk menyangkut jasa;
- c. Merumuskan kebijakan tentang kebersihan, kenyamanan dan keindahan kota;
- d. Menganalisa permasalahan dan merumuskan alternatif pemecahannya;
- e. Mengembangkan teknologi baru yang berdaya guna dan berhasil guna di bidang kebersihan;
- f. Menyiapkan konsep peraturan-peraturan dan menganalisa ketentuan dan peraturan di bidang kebersihan;
- g. Menyelenggarakan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya kebersihan;
- h. Mengupayakan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam menanggulangi kebersihan, keindahan dan kesejukan lingkungan;
- i. Membuat laporan dan evaluasi program;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Sub Dinas Penyusunan Program dan Pembinaan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Bina Program dan Pelaporan;
- b. Seksi Pembinaan Masyarakat.

- (2) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penyusunan Program dan Pembinaan Masyarakat.
- (1) Seksi Bina Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana peningkatan pelayanan kebersihan termasuk jasa, kebijakan tentang pengelolaan kebersihan, kenyamanan dan keindahan kota, ruang analisa permasalahan dan menyerahkan alternatif pemecahannya serta menyeimbangkan teknologi baru yang berdaya guna dan berhasil guna dan menyiapkan konsep peraturan-peraturan di bidang kebersihan;
- (2) Seksi Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan terhadap masyarakat tentang pentingnya kebersihan serta mengupayakan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam menanggulangi kebersihan, keindahan dan kesejukan lingkungan.

Sub Dinas Kebersihan

- (1) Sub Dinas Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Kebersihan dan Pertamanan di bidang kebersihan dan lingkungan, pengangkutan sampah serta tempat pembuang akhir (TPA) sampah dan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT);
- (2) Sub Dinas Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Dinas

Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja;
- b. Melaksanakan dan menyelenggarakan kebersihan lingkungan;
- c. Menyelenggarakan pembuangan dan pengangkutan sampah-sampah;
- d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan perencanaan teknis yang menyangkut kebersihan;
- e. Melaksanakan perencanaan teknis, pemeliharaan, perawatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPTL) dan Tempat Pembuang Akhir (TPA) sampah;
- f. Melaksanakan pengawasan atas kegiatan pelaksanaan tugas-tugas di bidang Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

(1) Sub Dinas Kebersihan terdiri dari :

- a. Seksi Kebersihan dan Lingkungan;
- b. Seksi Operasional Pengangkutan Sampah;
- c. Seksi TPA Sampah dan IPLT.

(2) Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Kebersihan.

(1) Seksi Kebersihan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kebersihan dan lingkungan termasuk parit/selokan dan anak sungai serta melaksanakan pengawasan, pengendalian dan perencanaan teknis yang mengukur bidang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

kebersihan;

- (2) Seksi Operasional Pengangkutan Sampah mempunyai tugas melaksanakan pembuangan dan pengangkutan sampah-sampah, merumuskan rute dan lokasi pengembangan dan pengangkutan sampah;
- (3) Seksi TPA Sampah dan IPLT mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis pemeliharaan, perawatan dan pelestarian pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah.

Sub Dinas Pertamanan, LPJU, dan Pemakaman Umum

- (1) Sub Dinas Pertamanan, LPJU dan Pemakaman Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Kebersihan dan Pertamanan di bidang Pertamanan dan Pemakaman Umum, Penerangan lampu Jalan Umum dan Lampu-lampu hias;
- (2) Sub Dinas Pertamanan, LPJU dan Pemakaman Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Dinas Pertamanan, LPJU dan Pemakaman Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja;
- b. Mengadakan dan melakanakan pembuatan;
- c. Menyelenggarakan pembibitan dan pemeliharaan/perawatan taman-taman, lapangan, gedung/lapangan olah raga dan pemakaman umum;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

- d. Melaksanakan perencanaan teknis, pemeliharaan dan perawatan penghijauan kota;
- e. Menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan lampu di sepanjang jalan umum dan lampu hias/lampu taman;
- f. Melakukan monitoring terhadap pemakaian rekening lampu jalan secara berkala;
- g. Melakukan pengawasan atas kegiatan pelaksanaan tugas-tugas di bidang lampu jalan dan lampu hias/lampu taman;
- h. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan lampu-lampu jalan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Sub Dinas Pertamanan, LPJU dan Pemakaman Umum terdiri dari :

- a. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Taman;
- b. Seksi Pemeliharaan/Perawatan Gedung/Lapangan Olahraga dan Pemakaman Umum;
- c. Seksi Pemeliharaan LPJU

(2) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pertamanan, LPJU dan Pemakaman Umum.

(1) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Taman mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan pembuatan taman, pembibitan pemeliharaan/perawatan taman-taman, perencanaan teknis, pemeliharaan dan perawatan penghijauan kota;

(2) Seksi Pemeliharaan/Perawatan Gedung/Lapangan Olahraga dan Pemakaman Umum mempunyai tugas pemeliharaan/perawatan gedung/lapangan olahraga dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

pemakaman umum;

- (3) Seksi Pemeliharaan Perawatan LPJU mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan lampu penerangan jalan umum/lampu hias/lampu taman dan perawatan LPJU, melakukan monitoring terhadap pemakaian rekening lampu jalan secara berkala dan melakukan pengawasan di bidang pemakaian dan penempatan lampu penerangan jalan, lampu hias/lampu taman.

Sub Dinas Angkutan dan Peralatan

- (1) Sub Dinas Angkutan dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Kebersihan dan Pertamanan di bidang operasional angkutan dan peralatan/perawatan sarana angkutan dan peralatan;
- (2) Sub Dinas Angkutan dan Peralatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Dinas Angkutan dan Peralatan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja;
- b. Menyelenggarakan sarana angkutan dan peralatan angkutan sampah;
- c. Menyelenggarakan perawatan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap sarana angkutan dan peralatan persampahan;
- d. Mengatur tatacara pelayanan kebersihan yang sebaik-baiknya bagi pemakai jasa (masyarakat) serta menyusun kegiatan pembinaan teknik organisasi kebersihan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Sub Dinas Angkutan dan Peralatan terdiri dari :

- a. Seksi Peralatan dan Perlengkapan;
- b. Seksi Perawatan Sarana Angkutan dan Peralatan..

(2) Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Angkutan dan Peralatan.

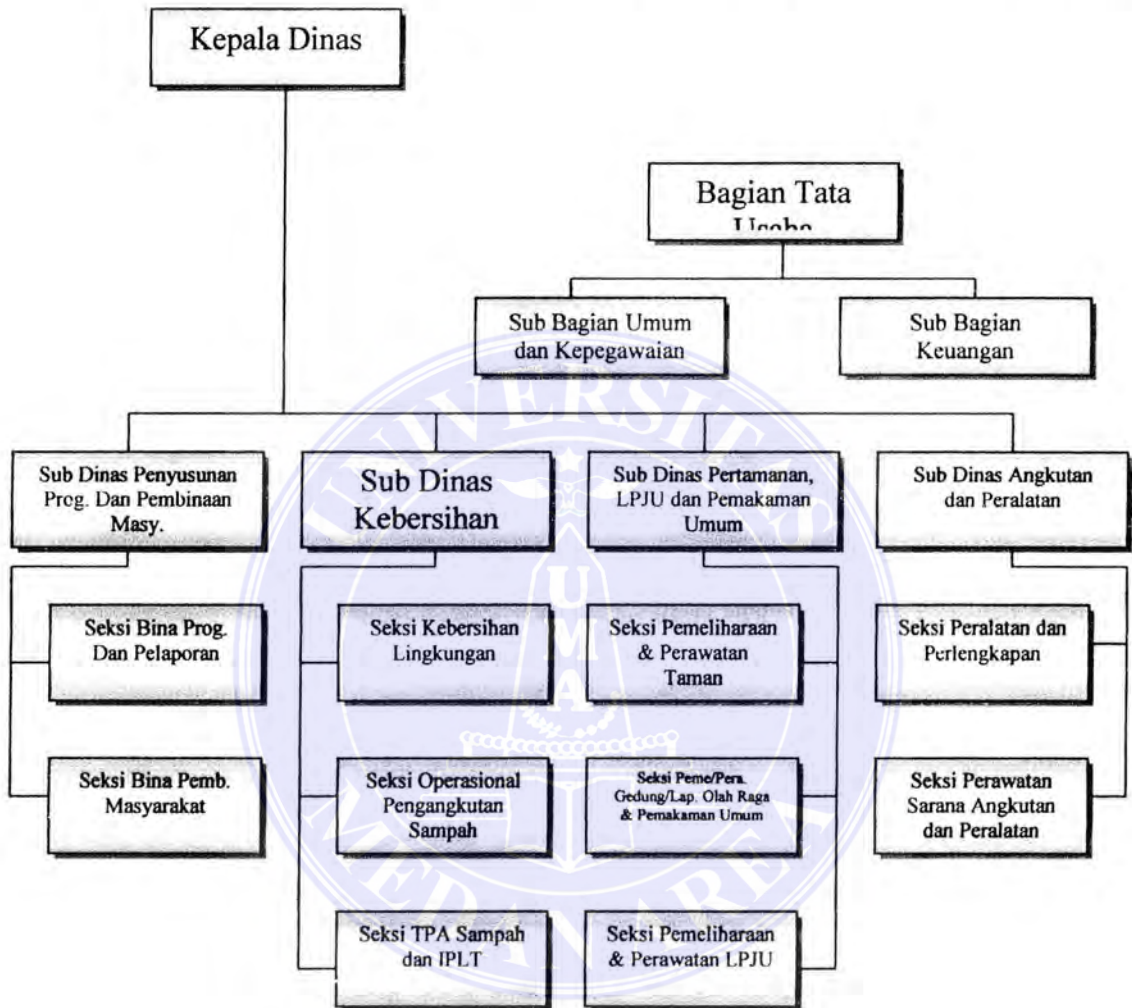
(1) Seksi Peralatan dan dan Perlengkapan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kelengkapan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam bidang kebersihan serta mengatur tatacara pemanfaatannya;

(2) Seksi Perawatan Sarana Angkutan dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan perawatan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap sarana angkutan dan peralatan persampahan.

Untuk mengetahui bagaimana struktur organisasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Deli Serdang maka dapat dilihat dari gambar berikut ini :

Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Deli Serdang



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 17 Tahun 2002

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Partisipasi masyarakat khususnya masyarakat perkotaan dalam bidang kebersihan pada dasarnya merupakan partisipasi pasif dimana masyarakat menganggap perbuatan-perbuatan melakukan kewajiban membayar retribusi sampah adalah suatu sistem partisipasi yang dapat mendukung program kebersihan yang dijalankan oleh pemerintah.
2. Tingkat partisipasi masyarakat perkotaan dalam bentuk gotong royong di bidang kebersihan semakin berkurang nilainya. Hal ini disebabkan tingkat kehidupan kota yang lebih mementingkan sisi efisiensi waktu dan individualistis.
3. Permasalahan kebersihan bukan semata-mata permasalahan pengelolaan sampah tetapi mencakup hal yang lebih luas lagi yaitu permasalahan lingkungan. Sedangkan permasalahan lingkungan tidak hanya mencakup permasalahan sekeliling semata tetapi mencakup hal ikhwal yang terjadi pada suatu lingkungan tertentu serta perubahan-perubahan dari lingkungan itu sendiri.
4. Perihal rusaknya lingkungan hidup bukan hanya semata-mata perihal tercemarnya udara, air maupun rusaknya hutan, tetapi juga meliputi permasalahan kependudukan, yaitu efek-efek dari aktivitas industri maupun

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

teknologi, seperti urbanisasi, perilaku, kriminalitas, sosial budaya dan lain sebagainya.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang hendaknya lebih dapat meningkatkan partisipasinya di bidang kebersihan dengan tidak menyerahkan semata-mata kepada Dinas Kebersihan tetapi turut melakukan kerjasama dengan cara meletakkan sampah pada tempat-tempat yang disediakan serta mengemas sampah menjadi lebih baik lagi.
2. Bagi aparatur pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan pemerintah Kabupaten Deli Serdang hendaknya dapat lebih aktif melakukan penyuluhan-penyuluhan bagi masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup bagi masa depan masyarakat sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008.
- Abdurrachman, *Pengembangan Azas dan Sistem Hukum Lingkungan*, Makalah pada Konpersi Pusat Study Lingkungan Seluruh Indonesia, Jakarta, 1981.
- Agustoha R. Kustoha, *Managemen Pembangunan Desa*, Penerbit Grafindo, Jakarta, 1985.
- BPHN, *Seminar Segi-Segi Hukum Dari pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bina Cipta, Bandung, 1977.
- Departemen Penerangan RI, *Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 2003*, Jakarta.
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1982.
- Ghajali, *Menggalakkan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan*, Socilia, Jakarta, 2009.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, UGM, Yogyakarta, 1983.
- Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, PT. Pembangunan, Jakarta, 2008.
- J. Wayong, *Fungsi Administrasi Negara*, Djambatan, 2003.
- Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, remadja Karya, Bandung, 2005.
- Miftah Thoha, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, CV. Rajawali, Jakarta, 1994.
- Mohammad Hatta, *Pengantar Ke Jalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara, Jakarta, 2009.
- Mutawali, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*, Ditbangdes Prop. Dati II Jabar, Bandung, 1984.
- Otto Soemarwoto, *Permasalahan Lingkungan Hidup*, Makalah pada Seminar Segi-Segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, BPHN, Bina Cipta Bandung, 1977.

- Pariata Westra, *Hubungan Kerja Kemanusiaan*, Balai Pembinaan Administrasi UGM, Yogyakarta, 1997.
- R.A. Santoso Poetro, *Partisipasi Komunikasi Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 1986.
- S.P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 2009.
- _____, *Proses Pengelola dan Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta, 2002.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Sumber Saporin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Suwignyo, *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.
- Taliziduhu Ndraha, *Hubungan Antara Partisipasi dan Tanggung Jawab Terhadap Hasil-Hasil Pembangunan*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 1983.
- _____, *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2003.
- _____, *Metodologi Pembangunan Desa*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- _____, *Pengertian Desa dan Pembangunan Desa*, Yayasan Karya Dharma II, Jakarta, 1997.
- Winardi, *Asas-Asas Manajemen*, Alumni, Bandung, 2003.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 2005.